

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Penerapan Perwako Nomor 15 Tahun 2015 dalam penganggaran kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih beragam, artinya dari segi jenis objek belanja yang diperkenankan, mayoritas SKPD tidak menganggarkan dalam kegiatannya, terutama pada belanja ATK, makan minum, dan cetak penggandaan. Dari sisi jumlah anggaran yang diperkenankan oleh Perwako, rata-rata SKPD tidak mengambil angka maksimal, selain keterbatasan anggaran pemko, SKPD juga menganggarkannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini merupakan langkah yang positif dalam hal efisiensi anggaran.
2. Hasil verifikasi kewajaran dengan model ASB yang menggunakan data DPA tahun 2015 terdapat 2 SKPD yang *overfinancing* dan 1 SKPD yang *underfinancing* dalam menganggarkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sedangkan model ASB dengan penyesuaian pada standar biaya menghasilkan nilai yang wajar untuk seluruh SKPD yang digunakan sebagai model penyusunan ASB.
3. Pembuatan model ASB dengan penyesuaian pada standar biaya menurut Perwako Nomor 15 Tahun 2015 menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan model ASB dengan data DPA tahun 2015, karena

memiliki deviasi standar yang lebih kecil. Persamaan regresi model ASB ini adalah $Y = 2.768.857 + 1,012 X$

5.2. SARAN

1. Melihat hasil analisis penerapan Perwako Nomor 15 tahun 2015, di mana banyak SKPD yang tidak menganggarkan sebuah objek belanja sebaiknya Tim Standar Analisa Biaya melakukan pengkajian atas efektifitas belanja tersebut dalam sebuah kegiatan, karena untuk sebuah pengadaan belanja modal, belanja administrasi seperti ATK, cetak dan penggandaan cukup diambil dari kegiatan penyediaan ATK maupun cetak dan penggandaan yang ada di sekretariat SKPD.
2. Model ASB untuk kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan penyesuaian anggaran menurut standar biaya (ASB model ke-2) dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Agar Pemerintah Kota Padang segera dapat membentuk tim penyusun ASB karena salah satu faktor terwujudnya anggaran berbasis kinerja adalah adanya analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran di pemerintah tersebut.

5.3. IMPLIKASI PENELITIAN

Tesis ini diharapkan akan memiliki implikasi:

1. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model ASB dengan kegiatan yang berbeda, terutama kegiatan yang memiliki biaya administrasi pengadaan dan *cost driver* berupa belanja modal

(konstruksi/pembangunan sarana), sehingga akan memberikan kontribusi dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

2. Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan, masukan dan informasi berguna bagi Pemerintah Kota Padang, terutama bagi penyusun anggaran (PPTK SKPD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam proses penyusunan maupun evaluasi anggaran. Adanya ASB menjadi panduan dalam menetapkan kewajaran anggaran sebuah kegiatan serta agar keragaman sebuah objek belanja dalam kegiatan yang sama bisa dikendalikan.

